



Laporan Keuangan

PENGADILAN TINGGI GORONTALO

TAHUN 2022 (*Audited*)

Kode 005.01.3100.664539



**LAPORAN KEUANGAN
TAHUNAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

PENGADILAN TINGGI GORONTALO

BAGIAN ANGGARAN 005.01.3100.664539

Gorontalo, Mei 2023

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tinggi Gorontalo adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Wilayah Pengadilan Tinggi Gorontalo mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tinggi Gorontalo. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Gorontalo, Mei 2023
SEKRETARIS

BENNY WALUKOW, SE
NIP. 1970104182005021001



DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Pernyataan Tanggung Jawab	vi
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	19
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	25
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	33
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	38
F. Pengungkapan Penting Lainnya	41
VI. Lampiran dan Daftar	

(Lampiran berupa cetakan dari aplikasi SAIBA dan BMN dan lampiran lainya yang mendukung)

seperti

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Realisasi Belanja
3. Laporan Pengembalian Belanja
4. Laporan Realisasi Pendapatan

5. Laporan Pengembalian Pendapatan
6. Neraca Percobaan
7. Laporan Operasional
8. Laporan Perubahan Ekuitas
9. Neraca
10. Berita Acara Opname Fisik Persediaan
11. BAR Internal
12. Surat Hasil Rekonsiliasi
13. Dokumen Lainnya

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel Laporan Realisasi Anggaran Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022	3
Tabel Neraca Per 31 Desember 2022	4
Tabel Laporan Operasional Per 31 Desember 2022	5
Tabel Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 2022	6
Tabel Perhitungan Penyisihan Piutang	13
Tabel Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	17
Tabel Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	19
Tabel Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember TA. 2022 dan Per 31 Desember 2021	20
Tabel Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Per 31 Desember TA. 2022	20
Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Per 31 Desember TA. 2022 dan Per 31 Desember 2021	21
Tabel Perbandingan Belanja Pegawai Per 31 Desember TA. 2022 dan Per 31 Desember 2021	22
Tabel Perbandingan Belanja Barang Per 31 Desember TA. 2022 dan Per 31 Desember 2021	23
Tabel Belanja Barang untuk Penanganan Pandemi Covid-19	23
Tabel Perbandingan Belanja Modal Per 31 Desember TA.2022 dan Per 31 Desember 2021	24
Tabel Rincian Kas Lainnya Setara Kas Per 31 Desember 2022	25
Tabel Rincian Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022	25
Tabel Rincian Persediaan Per 31 Desember 2022 dan Per 31 Desember 2021	26
Tabel Mutasi Nilai Tanah Per 31 Desember 2022 dan Per 31 Desember 2021	26
Tabel Rincian Saldo Tanah Per 31 Desember 2022	27
Tabel Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2022 dan Per 31 Desember 2021	27
Tabel Mutasi Nilai Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2022 dan Per 31 Desember 2021	28
Tabel Mutasi Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per 31 Desember 2022 dan Per 31 Desember 2021	29
Tabel Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021	29
Tabel Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan Per 31 Desember 2021	29
Tabel Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember	30

Tabel Mutasi Transaksi Terhadap Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2022	31
Tabel Rincian Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2022	31
Tabel Mutasi Aset Lain-Lain	31
Tabel Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	32
Tabel Rincian Utang kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember TA. 2022	32
Tabel Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Per 31 Desember TA. 2022	33
Tabel Rincian Beban Pegawai Per 31 Desember TA. 2022	33
Tabel Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember TA. 2022	34
Tabel Rincian Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember TA. 2022	34
Tabel Rincian Beban Pemeliharaan Per 31 Desember TA. 2022	35
Tabel Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember TA. 2022	35
Tabel Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember TA. 2022	36
Tabel Rincian Kegiatan Non Operasional Per 31 Desember TA. 2022	36
Tabel Rincian Transaksi Antar Entitas TA. 2022	39
Tabel Rincian Transfer Masuk/Keluar	40



PENGADILAN TINGGI GORONTALO

Jl. Tinaloga No. 2 Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara Kota Gorontalo – 96123

Telp/Fax : 0435-828070, 0435-8591262

Email : info@pt-gorontalo.go.id, Website : www.pt-gorontalo.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Wilayah Pengadilan Tinggi Gorontalo yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Gorontalo, Mei 2023
SEKRETARIS

BENNY A. W. ALUKOW, S.E
NIP. 19740411200502 1 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Gorontalo Tahunan 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp23.016.754 atau mencapai 66 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp34.656.000.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp15.731.716.562 atau mencapai 99 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp15.819.618.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022 .

Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp21.584.881.838; yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp86.067.267; Aset Tetap (*netto*) sebesar Rp21.496.589.821; Piutang Jangka Panjang (*netto*) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (*netto*) sebesar Rp2.224.750.

Nilai kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp2.679.180 dan Rp21.582.202.658.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp23.016.754, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp16.088.935.286 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp16.065.918.532. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing defisit sebesar Rp0 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp16.065.918.532.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp21.814.641.382 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp16.065.918.532, kemudian ditambah dengan Koreksi Lain-Lain sebesar Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp15.833.479.808 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp21.582.202.658.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahunan 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**PENGADILAN TINGGI GORONTALO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Des-22		% thd Angg	31-Des-21
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	34.656.000	23.016.754	66,41	18.434.294
JUMLAH PENDAPATAN		34.656.000	23.016.754	66,41	18.434.294
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	12.706.834.000	12.695.448.370	99,91	12.989.612.584
Belanja Barang	B.4	2.768.284.000	2.691.989.442	97,24	2.504.010.950
Belanja Modal	B.5	344.500.000	344.278.750	99,94	952.858.300
JUMLAH BELANJA		15.819.618.000	15.731.716.562	99,44	16.446.481.834

II. NERACA

PENGADILAN TINGGI GORONTALO NERACA PER 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-22	31-Dec-21
ASET			
ASET LANCAR			
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1	10,887,777	99,775,500
Persediaan	C.2	75,179,490	59,404,270
JUMLAH ASET LANCAR		86,067,267	159,179,770
ASET TETAP			
Tanah	C.3	7,602,649,000	7,602,649,000
Peralatan dan Mesin	C.4	5,155,475,041	4,706,266,291
Gedung dan Bangunan	C.5	14,922,950,200	14,922,950,200
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.6	476,458,000	476,458,000
Aset Tetap Lainnya	C.7	28,199,905	28,199,905
Akumulasi Penyusutan	C.8	(6,706,511,075)	(6,067,131,687)
JUMLAH ASET TETAP		21,479,221,071	21,669,391,709
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.9	29,985,000	29,985,000
Aset Lain-Lain	C.10	508,234,560	508,234,560
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.11	(535,994,810)	(535,149,643)
JUMLAH ASET LAINNYA		2,224,750	3,069,917
JUMLAH ASET		21,567,513,088	21,831,641,396
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.12	2,679,180	17,000,014
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		2,679,180	17,000,014
JUMLAH KEWAJIBAN		2,679,180	17,000,014
EKUITAS			
EKUITAS			
Ekuitas	C.13	21,564,833,908	21,814,641,382
JUMLAH EKUITAS		21,564,833,908	21,814,641,382
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		21,567,513,088	21,831,641,396

III. LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN TINGGI GORONTALO LAPORAN OPERASIONAL PER 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Des-22	31-Des-21
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	23.016.754	18.260.044
JUMLAH PENDAPATAN		23.016.754	18.260.044
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	12.695.448.370	12.961.926.550
Beban Persediaan	D.3	49.938.472	110.409.322
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.700.743.051	1.386.188.006
Beban Pemeliharaan	D.5	612.740.938	500.579.854
Beban Perjalanan Dinas	D.6	387.358.650	371.208.800
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	642.705.805	958.848.336
JUMLAH BEBAN		16.088.935.286	16.289.160.868
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(16.065.918.532)	(16.270.900.824)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8	0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0	0
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(16.065.918.532)	(16.270.900.824)
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa	D.9	0	0
SURPLUS/DEFISIT-LO		(16.065.918.532)	(16.270.900.824)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN TINGGI GORONTALO LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-22	31-Dec-21
EKUITAS AWAL	E.1	21,814,641,382	21,653,476,066
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(16,065,918,532)	(16,270,900,824)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	0	0
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3.1		
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.4	0	0
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.5	0	0
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.6	0	0
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.7	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	15,816,111,058	16,432,066,140
EKUITAS AKHIR	E.5	21,564,833,908	21,814,641,382

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 471 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 90/PMMK.06/2014;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Pada Pemerintah Pusat;
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
 17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
 18. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
 19. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Urusan Administrasi dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
 20. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 1330/SEK/SK/XII/2021 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis AkruaL dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan tupoksi Pengadilan Tinggi Gorontalo yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi yang ingin diwujudkan.

Sejalan dengan tujuan dan keinginan sebagaimana telah diuraikan dalam kebijaksanaan umum peradilan yang ada di Pengadilan Tinggi Gorontalo sebagaimana diuraikan dalam *BluePrint* Cetak Biru Pembaharuan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang merupakan sebuah pedoman/arah pendekatan yang akan ditempuh, Pengadilan Tinggi Gorontalo mempunyai visi yang sejalan dengan visi Mahkamah Agung RI.

Visi Pengadilan Tinggi Gorontalo dapat dirumuskan sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Gorontalo Sebagai Peradilan Yang Agung”

Untuk mewujudkan dan mencapai Visi Pengadilan Tinggi Gorontalo maka ditetapkan misi Pengadilan Tinggi Gorontalo yang menggambarkan hal-hal yang harus dilaksanakan yaitu :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Gorontalo;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Gorontalo;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Gorontalo.

Untuk mewujudkan Visi, Misi yang telah ditetapkan Pengadilan Tinggi Gorontalo mempunyai sasaran strategis yang terdiri dari :

1. Peningkatan penyelesaian perkara;
2. Peningkatan aksesibilitas terhadap putusan Hakim;
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan;
5. Peningkatan kualitas pengawasan;
6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam melakukan pengelolaan keuangan meliputi tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAKTI mencakup seluruh pengelolaan keuangan negara pada satker yang masing-masing pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi seperti modul penganggaran, modul komitmen, modul bendahara, modul aset tetap, modul persediaan, modul pembayaran, modul piutang dan modul GL dan pelaporan.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Pengadilan Tinggi Gorontalo menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan

Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Urusan Administrasi MA yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pengadilan Tinggi Gorontalo. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tinggi Gorontalo adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatandisajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan

belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan

naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bias diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan catatan jumlah unit pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi PMK Nomor 181/PMK.06/2016 sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga dan ATR yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan dan ATR yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,

Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara Umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
<i>Software</i>	4 Tahun
<i>Franchise</i>	5 Tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomo Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta asta Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek

jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Pengadilan Tinggi Gorontalo telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hingga saat ini satker Pengadilan Tinggi Gorontalo telah melakukan 11 (sebelas) kali revisi hingga akhir periode tahunan 2022 ini. Hal ini dapat dilihat dari rincian DIPA dibawah ini:

Uraian	2022	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan PNBPN	34,656,000	23,016,754
Jumlah Pendapatan	34,656,000	23,016,754
Belanja		
Belanja Pegawai	14,080,181,000	12,706,834,000
Belanja Barang	2,827,899,000	2,768,284,000
Belanja Modal	244,500,000	344,500,000
Jumlah Belanja	17,152,580,000	15,819,618,000

Revisi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut pada jenis belanja, terutama pada belanja pegawai.

Realisasi
Pendapatan
Rp23.016.754

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp23.016.754. Rincian realisasi pendapatan adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2022		
	Estimasi Pendapatan	Realisasi	% Real. Pendapatan
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha	34.656.000	23.016.754	66,41
Jumlah	34.656.000	23.016.754	66,41

Realisasi Pendapatan dari Pemanfaatan BMN per 31 Desember TA 2022 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 24,86%. Pendapatan ini berasal dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan yaitu sewa rumah dinas yang ditempati oleh Ketua dan Wakil Ketua, Hakim Tinggi, beserta pejabat struktural dan pendapatan sewa kantin yang ada pada

Kantor Pengadilan Tinggi Gorontalo.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan
per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021*

URAIAN	REALISASI PER 31 DESEMBER T.A. 2022	REALISASI PER 31 DESEMBER T.A. 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	23,016,754	18,260,044	26.05
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	174,250	-100.00
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	-	0.00
Jumlah	23,016,754	18,434,294	24.86

Rumah dinas yang tersedia sebanyak 7 (tujuh) namun yang ditempati sebanyak 5 (lima) rumah dinas.

*Realisasi Belanja
Negara
Rp15.731.716.562*

B. 2 Belanja

Akumulasi Realisasi Belanja instansi per 31 Desember TA 2022 adalah sebesar Rp15.731.901.584 dengan adanya pengembalian belanja sebesar Rp185.022 maka realisasi belanja *netto* Rp15.731.716.562 atau 99,45% dari anggaran belanja sebesar Rp15.819.618.000.

Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember TA 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2022

Uraian	2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	12,706,834,000	12,695,633,392	99.91
Belanja Barang	2,768,284,000	2,691,989,442	97.24
Belanja Modal	344,500,000	344,278,750	99.94
Total Belanja Kotor	15,819,618,000	15,731,901,584	99.45
Pengembalian		(185,022)	-
Jumlah	15,819,618,000	15,731,716,562	99.44

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan Belanja per 31 Desember TA 2021, total realisasi belanja per 31 Desember TA 2022 mengalami penurunan sebesar 4,35% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Realisasi belanja pegawai lebih rendah dari tahun sebelumnya karena dipengaruhi oleh jumlah pegawai yang mutasi keluar karena pindah;
2. Pagu untuk belanja modal tahun anggaran 2022 lebih sedikit dibanding pada tahun sebelumnya sehingga mempengaruhi realisasi belanja.

*Perbandingan Realisasi Belanja
per 31 Desember TA 2022 dan 31 Desember 2021*

URAIAN	REALISASI PER 31 DESEMBER TA 2022	REALISASI PER 31 DESEMBER TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	12.695.448.370	12.989.612.584	(2,26)
Belanja Barang	2.691.989.442	2.504.010.950	7,51
Belanja Modal	344.278.750	952.858.300	(63,87)
Jumlah	15.731.716.562	16.446.481.834	(4,35)

Belanja Pegawai
Rp12.695.448.370

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember TA 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp12.695.448.370 dan Rp12.989.612.584.

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2022 turun sebesar 2,26% dari per 31 Desember TA 2021. Secara keseluruhan hal ini disebabkan antara lain oleh adanya mutasi keluar beberapa Hakim dan 2 (dua) orang pegawai sehingga berpengaruh pada realisasi belanja pegawai.

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021

URAIAN	REALISASI PER 31 DESEMBER TA 2022	REALISASI PER 31 DESEMBER TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	11,339,672,392	11,746,574,926	(3.46)
Belanja Uang Makan PNS	427,861,000	429,888,000	(0.47)
Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	270,050,000	229,500,000	17.67
Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	658,050,000	585,500,000	12.39
Jumlah Belanja Kotor	12,695,633,392	12,991,462,926	(2.28)
Pengembalian Belanja Pegawai	(185,022)	(1,850,342)	(90.00)
Jumlah Belanja	12,695,448,370	12,989,612,584	(2.26)

Belanja Barang
Rp2.691.989.442

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember TA 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2.691.989.442 dan Rp2.504.010.950. Realisasi belanja barang naik sebesar 7.51% dari tahun sebelumnya. Hal ini diantaranya karena realisasi belanja barang persediaan yang naik secara signifikan.

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021

URAIAN	REALISASI PER 31 DESEMBER TA 2022	REALISASI PER 31 DESEMBER TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	779,120,832	678,810,911	14.78
Belanja Barang Non Operasional	36,908,050	15,741,000	134.47
Belanja Barang Persediaan	79,150,602	164,537,817	(51.90)
Belanja Jasa	810,147,280	790,553,613	2.48
Belanja Pemeliharaan	599,304,028	483,158,809	24.04
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	387,358,650	371,208,800	4.35
Jumlah Belanja Kotor	2,691,989,442	2,504,010,950	7.51
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	2,691,989,442	2,504,010,950	7.51

Satker Pengadilan Tinggi Gorontalo telah mengalokasikan belanja barang untuk penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp23.200.000. Pada revisi ke 7 tanggal 17 Oktober 2022 terdapat revisi anggaran untuk belanja non operasional pada akun belanja jasa – penanganan pandemi Covid-19 PT Gorontalo sebesar Rp16.550.000 dialihkan ke akun belanja peralatan dan mesin-ekstrakomptabel. Hingga periode pelaporan anggaran belanja barang untuk penanganan pandemi Covid-19 tersebut terserap sebesar Rp6.318.572 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Barang untuk Penanganan Pandemi COVID-19

Akun	Uraian Akun	Pagu	Realisasi	Penyerapan (%)
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	6,200,000	5,960,572	96.14
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	450,000	358,000	79.56
	Jumlah	6,650,000	6,318,572	95.02

Belanja Modal
Rp344.278.750

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember TA 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp344.278.750 dan Rp952.858.300. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi belanja modal sampai dengan akhir periode Tahunan TA 2022 turun sebesar 63,87% dibandingkan pada periode 31 Desember 2021.

*Realisasi Belanja Modal
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

URAIAN	REALISASI PER 31 DESEMBER TA 2021	REALISASI PER 31 DESEMBER TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	344,278,750	952,858,300	-63.87%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0.00%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0.00%
Belanja Modal Lainnya	0	0	0.00%
Jumlah Belanja Kotor	344,278,750	952,858,300	-63.87%
Pengembalian Belanja	0	0	0.00%
Jumlah Belanja	344,278,750	952,858,300	(63.87)

Realisasi belanja modal ini berupa belanja modal peralatan dan mesin yang berupa pengadaan pengolah data dan komunikasi serta pengadaan fasilitas perkantoran.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0

C.1 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara Kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Uraian	31-Dec-22	31-Dec-21
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Jumlah	-	-

Belanja Dibayar
Dimuka (Prepaid)
Rp10.887.777

C.2 Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp10.887.777 dan Rp99.775.500. Belanja dibayar dimuka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima sepenuhnya. Rincian Belanja Dibayar Dimuka adalah sebagai berikut :

Rincian Belanja Dibayar Dimuka

Jenis	31-Dec-22	31-Dec-21
Sewa Web Hosting	10,887,777	1,270,500
Sewa Mesin Fotocopy sewilayah PT Gorontalo	-	98,505,000
Jumlah	10,887,777	99,775,500

Persediaan
Rp75.179.490

C.3 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-

masing adalah sebesar Rp75.179.490 dan Rp59.404.270.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	31-Dec-22	31-Dec-21
Barang Konsumsi	50,449,100	43,441,200
Bahan untuk Pemeliharaan	24,730,390	15,963,070
Jumlah	75,179,490	59,404,270

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik, sesuai dengan Berita Acara Opname Fisik dengan nomor : W20-U/2267.A/PL.07/XII/2022.

Pada saat periode pelaporan persediaan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 telah nihil.

Tanah
Rp7.602.649.000

C.4 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pengadilan Tinggi Gorontalo per 31 Desember 2022 masih sama dengan nilai aset per 31 Desember 2021 masing-masing adalah Rp7.602.649.000 dan Rp7.602.649.000.

Tabel Mutasi Tanah

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	7,602,649,000
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Selisih Revaluasi Aset	0
Mutasi kurang:	
Saldo per 31 Desember 2022	7,602,649,000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	0
Nilai Buku per 31 Desember 2022	7,602,649,000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Tanah

NO	KIB	LUAS (m ²)	NO. SERTIFIKAT	ATAS NAMA	PERUNTUKAN	JUMLAH
1	2	5.695	31.01.03.05.2.00037	PT. GORONTALO	Gedung Kantor PT. Gorontalo	5.845.918.000
2	4	10.986	Sertifikat Belum Ada	SP. PEMPROV GTLO	Gedung Kantor Lama PT. Gorontalo	550.730.000
3	1	780	31.01.05.08.2.00010	PT. GORONTALO	Rumah Dinas Hakim	302.865.000
4	1	2.370	31.01.05.08.2.00036	PT. GORONTALO		903.136.000
J U M L A H						7.602.649.000

Peralatan dan
Mesin
Rp5.175.325.041

C.5 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp5.175.325.041 dan Rp4.706.266.291.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel Mutasi Peralatan dan Mesin

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	4,706,266,291
Mutasi tambah:	
Pembelian	344,278,750
Transfer Masuk	124,780,000
Mutasi kurang:	
Transfer Keluar	19,850,000
Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya	0
Saldo per 31 Desember 2022	5,155,475,041
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	4,370,457,970
Nilai Buku per 31 Desember 2022	785,017,071

Rincian aset tetap peralatan dan mesin disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Mutasi Tambah :

- a. Pembelian sebesar Rp344.278.750 berupa:
 1. Alat Kantor & Rumah Tangga sebesar Rp194.601.000;
 2. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar Rp99.927.750;
 3. Alat Laboratorium sebesar Rp39.750.000;
 4. Komputer sebesar Rp10.000.000;

- b. Transfer Masuk sebesar Rp124.780.000 berupa:
1. Komputer sebesar Rp124.780.000;

Mutasi Kurang :

- a. Transfer Keluar sebesar Rp19.850.000 berupa:
1. Komputer sebesar Rp19.850.000.

Gedung dan
Bangunan
Rp14.922.950.200

C.6 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp14.992.950.200 dan Rp14.992.950.200.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel Mutasi Gedung dan Bangunan

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	14,922,950,200
Mutasi tambah:	
Pengembangan Nilai Aset	0
Mutasi kurang:	
Koreksi kesalahan input IP	0
Saldo per 31 Desember 2022	14,922,950,200
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	(2,103,818,956)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	12,819,131,244

Rincian aset tetap gedung dan bangunan disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi dan
Jaringan
Rp476.458.000

C.7 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp476.458.000 dan Rp476.458.000.

Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	476,458,000
Mutasi tambah:	
Revaluasi aset	0
Mutasi kurang:	
Koreksi kesalahan input IP	0
Saldo per 31 Desember 2022	476,458,000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	219,227,399
Nilai Buku per 31 Desember 2022	257,230,601

Rincian aset tetap jalan, irigasi dan jaringan disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya
Rp28.199.905

C.8 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp28.199.905 dan Rp28.199.905. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian dan buku perpustakaan (monografi).

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Aset Tetap Lainnya

Uraian	31-Dec-22	31-Dec-21
Buku Perpustakaan	12,711,905	12,711,905
Alat Musik Modern (Keyboard)	15,488,000	15,488,000
Jumlah	28,199,905	28,199,905

Tabel Mutasi Aset Tetap Lainnya

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	28,199,905
Mutasi tambah:	
Transfer masuk monografi	0
Mutasi kurang:	
Saldo per 31 Desember 2022	28,199,905
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	-15,488,000
Nilai Buku per 31 Desember 2022	12,711,905

Buku Perpustakaan tidak mengalami penyusutan

Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp6.708.992.325

C.9 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap dilakukan pada setiap semester. Pada Triwulan III terdapat transaksi BMN yang menghasilkan pencatatan penyusutan transaksional sehingga saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp(6.708.992.325) dan Rp(6.067.131.687).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	5,155,475,041	4,367,976,720	787,498,321
2	Gedung dan Bangunan	14,922,950,200	2,103,818,956	12,819,131,244
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	476,458,000	219,227,399	257,230,601
4	Aset Tetap Lainnya	28,199,905	15,488,000	12,711,905
Akumulasi Penyusutan		20,583,083,146	6,706,511,075	13,876,572,071

Buku Perpustakaan yang merupakan aset tetap lainnya tidak mengalami penyusutan.

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Aset Tak Berwujud
Rp29.985.000

C.10 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp29.985.000 dan Rp29.985.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Pengadilan Tinggi Gorontalo berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel Mutasi Aset Tak Berwujud

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	29.985.000
Mutasi tambah:	0
Mutasi kurang:	0
Saldo per 31 Desember 2021	29.985.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	(29.985.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	0

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud

Uraian	Nilai
Software	29.985.000
Jumlah	29.985.000

Aset Lain-Lain
Rp508.234.560

C.11 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp508.234.560 dan Rp508.234.560. Aset Lain-Lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel Mutasi Aset Lain-Lain

Saldo per 31 Desember 2021	508,234,560
Mutasi tambah:	
Reklas dari Aset Tetap	0
Mutasi kurang:	
Penghapusan BMN	0
Saldo per 31 Desember 2022	508,234,560
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	-506,009,810
Nilai Buku per 31 Desember 2022	2,224,750

Akumulasi
Penyusutan/Amortis
asi Aset Lainnya
Rp535.994.810

C.12 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo akumulasi penyusutan/amortisasi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp535.994.810 dan Rp535.149.643. Akumulasi penyusutan/amortisasi aset lainnya sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud (Software)	29,985,000	29,985,000	0
Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	508,234,560	506,009,810	2,224,750
Jumlah	538,219,560	535,994,810	2,224,750

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

C.13 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga Rp2.679.180

Nilai utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp2.679.180 dan Rp17.000.014. Utang pada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	Rp -	
2	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	Rp 2,679,180	Pemakaian langganan daya (air, telepon) bulan Desember 2022 yang belum dibayar.
Total		Rp 2,679,180	

C.14 Ekuitas

Ekuitas Rp21.582.202.658

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp21.564.833.908 dan Rp21.814.641.382.

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP
Rp23.016.754

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan dari kegiatan operasional yakni PNBP untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp23.016.754 dan Rp18.260.044. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak

URAIAN	REALISASI PER 31 DESEMBER 2022	REALISASI PER 31 DESEMBER 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	23,016,754	18,260,044	20.67
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	-	-
JUMLAH	23,016,754	18,260,044	20.67

Beban Pegawai
Rp12.695.448.370

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp12.695.448.370 dan Rp12.961.926.550. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai

URAIAN JENIS BEBAN	PER 31 DESEMBER 2022	PER 31 DESEMBER 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	3,030,850,660	2,963,869,900	2.21
Beban Pembulatan Gaji	36,578	36,012	1.55
Beban Tunjangan-Tunjangan PNS	8,308,785,154	8,754,982,980	(5.37)
Beban Uang Makan PNS	427,861,000	429,888,000	(0.47)
Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	270,050,000	229,500,000	15.02
Beban Tunjangan Hakim Ad Hoc	658,050,000	585,500,000	11.02
Jumlah Beban Pegawai Kotor	12,695,633,392	12,963,776,892	(2.11)
Pengembalian Beban Pegawai	(185,022)	(1,850,342)	(900.07)
Jumlah	12,695,448,370	12,961,926,550	(2.10)

Beban Persediaan
Rp49.938.472

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp49.938.472 dan Rp110.409.322. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan

URAIAN JENIS BEBAN	PER 31 DESEMBER 2022	PER 31 DESEMBER 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	49,938,472	110,409,322	(121.09)
Jumlah Beban Persediaan	49,938,472	110,409,322	(121.09)

Beban Barang dan
Jasa
Rp1.700.743.051

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.700.743.051 dan Rp1.386.188.006. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa

URAIAN JENIS BEBAN	PER 31 DESEMBER 2022	PER 31 DESEMBER 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	649,453,924	430,045,990	33.78
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	16,697,450	10,469,040	37.30
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	65,930,000	63,846,000	3.16
Beban Barang Operasional Lainnya	48,309,958	173,179,381	-258.48
Beban Barang Operasional Lainnya - Penanganan Pandemi Covid-19	0	0	0.00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	0	0.00
Beban Barang Non Operasional Lainnya - Penanganan Pandemi Covid-19	0	1,991,000	
Beban Bahan	13,071,000	13,750,000	-5.19
Beban Langganan Daya dan Jasa	199,801,410	217,821,595	-9.02
Beban Sewa	625,184,259	473,115,000	24.32
Beban Jasa Profesi	52,200,000	0	100.00
Beban Jasa Lainnya	5,900,000	1,200,000	79.66
Beban Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	358,000	0	100.00
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	23,837,050	770,000	
Jumlah	1,700,743,051	1,386,188,006	18.50
Pengembalian beban langganan listrik	0	0	0.00
Jumlah	1,700,743,051	1,386,188,006	18.50

Beban
Pemeliharaan
Rp612.740.938

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp612.740.938 dan Rp500.579.854. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian beban pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan

URAIAN JENIS BEBAN	PER 31 DESEMBER 2022	PER 31 DESEMBER 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	328,031,418	254,474,875	22.42
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi Covid-19	0	0	0.00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	47,976,636	27,577,100	42.52
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	223,295,974	201,106,834	9.94
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	13,436,910	17,421,045	-29.65
Jumlah	612,740,938	500,579,854	18.30

Beban Perjalanan
Dinas
Rp387.358.650

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp371.208.800. dan Rp371.208.800. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas

URAIAN JENIS BEBAN	PER 31 DESEMBER 2022	PER 31 DESEMBER 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	365,308,650	357,258,800	2.20
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	22,050,000	13,950,000	36.73
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	0.00
Jumlah	387,358,650	371,208,800	4.17
Pengembalian	0	0	0.00
Jumlah	387,358,650	371,208,800	4.17

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp642.705.805

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah Rp642.705.805 dan Rp958.848.336. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN	PER 31 DESEMBER 2022	PER 31 DESEMBER 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	286,136,440	596,079,738	-108.32
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	326,483,348	333,105,164	-2.03
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	29,240,850	29,240,850	0.00
Beban Amortisasi Software	-	-	0.00
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam operasional Pemerintah	845,167	422,584	50.00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	642,705,805	958,848,336	-49.19

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Rp0

D.8 Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional

URAIAN	PER 31 DESEMBER 2022	PER 31 DESEMBER 2021	NAIK (TURUN) %
Surplus Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0.00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0.00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0	0	0.00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0.00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0.00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0.00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	0	0.00

Pos Luar Biasa Rp0 **D.9 Pos Luar Biasa**

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada diluar kendali entitas. Rincian pos Luar Biasa untuk tahun 2021 dan tahun 2020 masing-masing adalah Rp0 dan Rp0.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp21.814.641.382*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp21.814.641.382 dan Rp21.653.476.066.

*Defisit LO
Rp16.065.918.532*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp16.065.918.532 dan Rp16.270.900.824. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Dampak Kumulatif
Perubahan
Kebijakan/Kesalahan
Mendasar*

E.3 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar.

*Penyesuaian Nilai
Aset Rp0*

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir. Penyesuaian Nilai Aset Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp0*

E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk 31 Desember 2022 adalah Rp0 dan 31 Desember 2021 adalah Rp0.

*Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp0*

E.3.4 Koreksi Atas Reklasifikasi

Merupakan koreksi atas reklasifikasi persediaan/aset tetap/aset lainnya yang dihasilkan dari transaksi Reklasifikasi Masuk dan Keluar BMN dari aplikasi persediaan.

Untuk periode hingga 31 Desember 2022 adalah Rp0 dan 31 Desember 2021 adalah Rp0.

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp0*

E.3.5 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Nilai Aset
Tetap Non Revaluasi
Rp0

E.3.6 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lain yang bukan karena revaluasi nilai. Koreksi nilai aset tetap non revaluasi per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Lain-Lain
Rp0

E.3.7 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi Antar
Entitas
Rp15.833.479.808

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp15.816.111.058 dan Rp16.432.066.140. Transaksi Antar Entitas adalah Transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima Dari Entitas Lain	23,016,754
Ditagihkan ke Entitas Lain	15,731,716,562
Transfer Masuk	124,780,000
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	15,833,479,808

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2022, DDEL sebesar Rp23.016.754 sedangkan DKEL sebesar Rp15.731.716.562.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 berupa Aset Tetap Lainnya dan Peralatan Mesin dengan total sebesar Rp124.780.000 sebagai berikut:

Rincian Transfer Masuk

Satker Pengirim (TK)	Satker Penerima (TM)	Uraian	Nilai
Badan Urusan Administrasi	Pengadilan Tinggi Gorontalo	Laptop	104,930,000
Badan Urusan Administrasi	Pengadilan Tinggi Gorontalo	Alat Pengolah Data	19,850,000
Jumlah			124,780,000

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp19.850.000.

Rincian Transfer Keluar

Satker Pengirim (TK)	Satker Penerima (TM)	Uraian	Nilai
Pengadilan Tinggi Gorontalo	Badan Urusan Administrasi	Alat Pengolah Data	19,850,000
Jumlah			19,850,000

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan hibah langsung sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar 0.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0.

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp21.564.833.908 dan Rp21.814.641.382.

kuitas Akhir
Rp21.564.833.908

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.2.1 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Sejak awal tahun anggaran 2012 pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak terdapat temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

F.2.2 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL

Sampai dengan periode 31 Desember Tahun Anggaran 2022 terdapat Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual untuk Pengadilan Tinggi Gorontalo Kode Anggaran 005.01. Data dapat dilihat pada lampiran.

F.2.3 REKENING PEMERINTAH

Rekening Bendahara Pengeluaran

Rekening yang dimiliki Pengadilan Tinggi Gorontalo adalah *Virtual Account* atas nama BPG 050 Kantor Pengadilan Tinggi Gorontalo pada Bank BRI Cabang Gorontalo, Nomor rekening : 653246645391000. Data dapat dilihat pada lampiran.

F.2.4 REVISI DIPA

Sampai dengan 31 Desember 2021 Pengadilan Tinggi Gorontalo telah melakukan revisi terhadap DIPA sebanyak 14 (empat belas) kali yaitu sebagai berikut :

1. Revisi DIPA ke-01 tanggal 14 Desember 2021, berupa revisi *Automatic Adjustment* Anggaran Tahun 2022 sejumlah Rp142.032.000;
2. Revisi DIPA ke-02 tanggal 11 Februari 2022, berupa pemutakhiran POK dan Revisi Halaman III DIPA revisi penyesuaian Halaman III DIPA;
3. Revisi DIPA ke-03 tanggal 15 April 2022, berupa penyesuaian halaman III DIPA dan pemutakhiran dato POK;
4. Revisi DIPA ke-04 tanggal 02 Juni 2022, berupa pemutakhiran POK dan optimalisasi belanja modal;
5. Revisi DIPA ke-05 tanggal 13 Juli 2022, berupa penyesuaian Halaman III DIPA dan pemutakhiran POK belanja operasional dan pemeliharaan kantor;
6. Revisi DIPA ke-06 tanggal 21 Juli 2022, berupa Pemutakhiran POK dan Penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) Halaman III DIPA Triwulan III;

7. Revisi DIPA ke-07 tanggal 17 Oktober 2022, berupa pemutakhiran POK dan penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) Halaman III DIPA Triwulan IV;
8. Revisi DIPA ke-08 tanggal 26 Oktober 2022, berupa Pencantuman/Penghapusan/Perubahan Catatan Halaman IV.A (Blokir);
9. Revisi DIPA ke-09 tanggal 29 November 2022, berupa pemenuhan biaya operasional (penambahan belanja modal) dan persegeran antar satker (belanja pegawai);
10. Revisi DIPA ke-10 tanggal 20 Desember 2022, berupa penyesuaian pagu minus belanja pegawai, penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD), dan pemutakhiran POK;
11. Revisi DIPA ke-11 tanggal 27 Desember 2022, berupa penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) dan Pemutakhiran POK;

F.2.5 RALAT SPM, SSBP, DAN SSPB

F.2.5.1 RALAT SPM

Sampai dengan akhir periode 31 Desember 2022 Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak ada ralat SPM.

F.2.5.2 Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB)

Sampai dengan akhir periode 31 Desember 2022 pada satuan kerja Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak ada pengembalian belanja.

F.2.6 CATATAN PENTING LAINNYA

Berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI No 6/PA/SK/II/2022 tanggal 16 Februari 2022 telah ditunjuk Sdr. Benny A.Y Walukow, S.E – Sekretaris Pengadilan Tinggi Gorontalo sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Serta Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: W20.U/1525/KU.01/IX/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan di Lingkungan Pengadilan Tinggi Gorontalo, dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: W20.U/1526/KU.01/IX/2022 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 2 September 2022, terdapat penggantian Pejabat Pengelola Keuangan,

Semula:

Pejabat Pembuat Komitmen	: Herdi Pakaya, S.H
Pejabat Penandatangan/Penguji SPM	: Deddy S. Botutihe, S.Kom
Bendahara Pengeluaran	: Ivan T. Ombuh, SE
Bendahara Penerima	: Novawati Monoarfa, A.Md
PPABP	: Jafar Potale

Menjadi:

Pejabat Pembuat Komitmen	: Herdi Pakaya, S.H
Pejabat Penandatangan/Penguji SPM	: Deddy S. Botutihe, S.Kom
Bendahara Pengeluaran	: Novawati Monoarfa, A.Md
Bendahara Penerima	: Ivan T. Ombuh, SE
PPABP	: Jafar Potale

Lampiran A1

Pengadilan Tinggi Gorontalo
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi,
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2022

No	Aset Tetap	Masa	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Total Akm. Peny.	Nilai Buku
		Manfaat		Per 31 Des' 2021	Per 31 Des' 2022	Per 31 Des' 2022	Per 31 Des' 2022
A	Tanah						
1	Tanah	-	7,602,649,000	-	-	-	7,602,649,000
	Jumlah		7,602,649,000	-	-	-	7,602,649,000
B	Peralatan dan Mesin						
1	Alat Angkutan	7	1,087,793,556	1,087,793,556	0	1,087,793,556	0
2	Alat Bengkel dan Alat Ukur	7	1,704,500	1,704,500	0	1,704,500	0
3	Alat Pertanian	5	28,280,000	28,280,000	0	28,280,000	0
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	4	2,232,644,620	1,856,483,192	93,584,508	1,950,067,700	282,576,920
5	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	5	575,558,590	242,833,132	61,077,143	303,910,275	271,648,315
6	Kursi Dorong	4	1,348,000	404,400	269,600	674,000	674,000
7	Alat Laboratorium	5	51,080,000	7,740,333	5,724,084	13,464,417	37,615,583
8	Komputer	5	1,177,065,775	859,082,417	122,999,855	982,082,272	194,983,503
	Jumlah		5,155,475,041	4,084,321,530	283,655,190	4,367,976,720	787,498,321
C	Gedung dan Bangunan						
1	Bangunan Gedung	50	14,038,318,200	1,664,727,624	304,834,118	1,969,561,742	12,068,756,458
2	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50	884,632,000	112,607,984	21,649,230	134,257,214	750,374,786
	Jumlah		14,922,950,200	1,777,335,608	326,483,348	2,103,818,956	12,819,131,244
D	Jalan dan Jembatan						
1	Jalan Khusus Kompleks	40	130,129,000	98,394,006	15,867,497	114,261,503	15,867,497
	Jumlah		130,129,000	98,394,006	15,867,497	114,261,503	15,867,497
E	Irigasi						
1	Bangunan Air	40	48,804,000	36,933,543	5,935,228	42,868,771	5,935,229
	Jumlah		48,804,000	36,933,543	5,935,228	42,868,771	5,935,229
F	Jaringan						
1	Instalasi Gardu Listrik Induk	40	99,995,000	27,498,625	2,499,875	29,998,500	69,996,500
2	Jaringan Listrik Lainnya	40	197,530,000	27,160,375	4,938,250	32,098,625	165,431,375
	Jumlah		297,525,000	54,659,000	7,438,125	62,097,125	235,427,875
G	Aset Tetap Lainnya						
1	Alat Musik Modern/Band	40	15,488,000	15,488,000	-	15,488,000	-
2	Buku Perpustakaan		12,711,905	-	-	-	12,711,905
	Jumlah		28,199,905	15,488,000	-	15,488,000	12,711,905
H	Software						
1	Aset Tak Berwujud	4	29,985,000	29,985,000	-	29,985,000	-
	Jumlah		29,985,000	29,985,000	-	29,985,000	-
I	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan						
1	Alat Kantor dan Rumah Tangga		217,841,575	217,841,575	0	217,841,575	-
2	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar		3,685,000	3,685,000	0	3,685,000	-
3	Alat Laboratorium		12,677,500	9,607,583	845,167	10,452,750	2,224,750
4	Komputer		274,030,485	274,030,485	0	274,030,485	-
	Jumlah		508,234,560	505,164,643	845,167	506,009,810	2,224,750
	Total		28,723,951,706	6,602,281,330	640,224,555	7,242,505,885	21,481,445,821

*Tanah dan buku tidak mengalami penyusutan